

ABSTRAK

LELA WIJAYANTI. 2025. Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Pesisir Pantai Pangandaran Di Kabupaten Pangandaran.”

Penelitian ini dilatarbelakangi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan sampah Pesisir Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran yang belum optimal dengan masalah yang ditemukan terletak kurangnya optimalnya fasilitas zonasi larangan pembuangan sampah, kurangnya pengawasan mengenai pengelolaan sampah pesisir pantai, tidak aktifnya TPS3R sebagai tempat pengolahan sampah dan belum dilakukannya Kerjasama dalam pemenuhan fasilitas untuk menunjang pengelolaan sampah pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan bank sampah belum sesuai dengan teori peran pemerintah dalam sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2013:6). Hal tersebut terlihat dari 9 indikator, terdapat 4 indikator yang belum berjalan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi antara lain yaitu pada zonasi larangan membuang sampah sembarangan yang tidak bertahan lama, pengawasan yang dilakukan belum menyeluruh hanya mengandalkan laporan coordinator lapangan, fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) belum berfungsi optimal karena keterbatasan peralatan, belum dilaksanakannya pengawasan dalam pengelolaan sampah pesisir pantai sehingga kurangnya pengontrolan dan masalah pendanaan dan Pola kerja sama cenderung berorientasi bisnis, di mana pihak swasta lebih fokus pada keuntungan dari pengangkutan sampah hotel daripada memenuhi kebutuhan fasilitas publik secara merata. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain memperkuat regulasi melalui sosialisasi larangan membuang sampah sembarangan serta pemasangan papan imbauan di area strategis, mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan Bank Sampah Induk dan Unit sebelum adanya reaktifasi TPS3R. Selain itu, DLHK juga aktif melaksanakan kampanye dalam kegiatan *World Clean Up Day*, pemberdayaan sekolah dan komunitas lokal, hingga kegiatan gotong royong bersama masyarakat dan wisatawan melalui gerakan bersih pantai pada event-event tertentu.

Kata kunci: Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah Pesisir

ABSTRACT

LELA WIJAYANTI. 2025. This thesis is entitled “The Role of the Department of Environment and Sanitation in Coastal Waste Management at Pangandaran Beach in Pangandaran Regency.”

This research is motivated by the role of the Pangandaran Regency Environmental and Sanitation Agency in managing Pangandaran Coastal waste in Pangandaran Regency which is not optimal with the problems found being the lack of optimal zoning facilities for waste disposal prohibitions, lack of supervision regarding coastal waste management, the inactivity of TPS3R as a waste processing site and the lack of cooperation in providing facilities to support coastal waste management. The purpose of this research is to determine the role of the Environmental and Sanitation Agency in managing waste banks in Pangandaran Regency. This research uses a qualitative approach with 7 informants. The data collection techniques are through structured interviews, participant observation, and documentation. The data processing or analysis techniques in this research use data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the research, it is known that the role of the Environmental and Sanitation Agency in managing waste banks is not in accordance with the theory of the role of government in the public sector according to Jones in Mahsun (2013: 6). This can be seen from 9 indicators, there are 4 indicators that have not been running optimally. The obstacles that occurred include the zoning prohibition of littering which did not last long, the supervision carried out was not comprehensive and only relied on field coordinator reports, the Reduce-Reuse-Recycle Waste Processing Facility (TPS3R) was not functioning optimally due to limited equipment, supervision had not been implemented in coastal waste management resulting in a lack of control and funding problems and the pattern of cooperation tended to be business-oriented, where the private sector was more focused on profits from hotel waste transportation rather than meeting the needs of public facilities evenly. The efforts made included strengthening regulations through socialization of the prohibition of littering and the installation of warning boards in strategic areas, optimizing waste management with the Main Waste Bank and Units before the reactivation of TPS3R. In addition, DLHK also actively carried out campaigns in World Clean Up Day activities, empowering schools and local communities, to mutual cooperation activities with the community and tourists through beach clean-up movements at certain events.

Keywords: Role, Environmental Agency, Coastal Waste